

DARI SEJARAH LOKAL SUL-SEL KE SEJARAH LOKAL SUL-SELBAR: MEMIKIRKAN PERSPEKTIF BARU SEJARAH LOKAL

Burhaman

*Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI), Makassar*

Abstrak

Pertanyaan utama yang akan diajukan untuk dibahas dalam tulisan ini adalah apakah Sejarah lokal itu? Apakah sejarah lokal berdiri sendiri atau sebagai bagian dari sejarah nasional? Apakah perbedaan antara sejarah lokal dengan jenis sejarah lainnya misalnya sejarah nasional? Apakah sejarah lokal memiliki, teori, konsep dan metodologi sendiri yang berbeda dengan unit sejarah yang lain? Rangkaian pertanyaan-pertanyaan tersebut akan lebih bermakna jika dihubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Taufik Abdullah (1985) dan Sartono Kartodirdjo (1993) bahwa sejarah lokal bukanlah sejarah nasional versi lokal, sebaliknya juga sejarah nasional bukan kumpulan sejarah lokal. Sejarah lokal dan sejarah nasional saling berkaitan akan tetapi keduanya mempunyai metodologi, konsep, dan ruang lingkup yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tulisan ini menunjukkan hal-hal tersebut di atas dengan menggunakan sejarah-sejarah local Sulawesi bagian selatan.

Kata kunci: Historiografi, Sejarah Lokal, Sulawesi selatan.

Abstract

The main question being raised in this paper is what is local history? Does local history stand by itself or is it part of the national history? What is the different between local history with, say, national history? Does local history have its own theory, concept and methodology which are different that other histories? These questions have more meaning if they are related to what Taufik Abdullah (1985) and Saronon Kartodirdjo (1993) said that local history is not a local version of national history and national history is not the sum of local histories. Local history and national history are intertwined but each has its own methodology, concept and scope that are different with others'. This paper elucidates these issues using south Sulawesi histories.

Keywords: historiography, local history, south Sulawesi.

PENDAHULUAN

Tema yang tidak kalah pentingnya untuk diperbincangkan dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Perhimpunan Program Sejarah Se-Indonesia (PPSI) adalah tentang sejarah lokal. Dikatakan demikian, karena disamping sebagai unit analisa dalam ilmu sejarah, sejarah lokal juga adalah nama dari salah satu (atau salah dua atau tiga) mata kuliah yang diajarkan di jurusan sejarah di perguruan tinggi, baik di jurusan kependidikan sejarah maupun non kependidikan. Di antara unit-unit kajian sejarah yang ada sejarah lokal-lah “paling tidak jelas” ruang lingkup kajiannya. Tidak hanya itu dalam penerapannya baik konsep, teori dan metodologi belum memperlihatkan kecenderungan yang seragam, sehingga terdapat tumpang-tindih dengan unit-unit kajian yang lain, misalnya saja sejarah nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan utama yang akan diajukan untuk dibahas dalam seminar dan rapat kerja kali ini adalah apakah Sejarah lokal itu? Apakah sejarah lokal berdiri sendiri atau sebagai bagian dari sejarah nasional? Apakah perbedaan antara sejarah lokal dengan jenis sejarah lainnya misalnya sejarah nasional? Apakah sejarah lokal memiliki, teori, konsep dan metodologi sendiri yang berbeda dengan unit sejarah yang lain? Rangkaian pertanyaan-pertanyaan tersebut akan lebih bermakna jika dihubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Taufik Abdullah (1985) dan Sartono Kartodirdjo (1993) bahwa sejarah lokal bukanlah sejarah nasional versi lokal, sebaliknya juga sejarah nasional bukan kumpulan sejarah lokal. Sejarah lokal dan sejarah nasional saling berkaitan akan tetapi keduanya mempunyai metodologi, konsep, dan ruang lingkup yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas adalah tentang periodisasi atau pembabakan dalam sejarah lokal. Jika sejarah lokal bukanlah sejarah nasional, apakah periodisasi penting, seperti yang ada dan diterapkan dalam sejarah nasional? Jika periodisasi tidak bisa dielakkan, apakah penerapannya harus sama dengan sejarah nasional? Sebagaimana dengan sejarah lokal Sulawesi Selatan Abad ke-17 dan Sejarah Lokal Sulawesi Selatan Abad 18-20? Periodisasi seperti ini dapat dipastikan “meniru” sejarah nasional yang oleh Taufik Abdullah (1985) dikatakan akan mengantar kita menuju ke kesalahan perspektif historis yang tak dapat dipertanggung-jawabkan.

Selanjutnya, terkait dengan materi kuliah di perguruan tinggi yang mengajarkan sejarah lokal. Apakah pada Mata Kuliah Sejarah Lokal di perguruan tinggi tersebut mengajarkan sejarah lokal daerah masing-masing? Misalnya di Sulawesi Selatan, maka mata kuliahnya Sejarah Lokal Sulawesi Selatan? Atau mengajarkan Sejarah Lokal Sulawesi Selatan dan Sejarah Lokal di luar Sulawesi Selatan atau disebut sebagai Sejarah Lokal Indonesia? Untuk Jurusan Sejarah Universitas Hasanuddin pada awalnya bisa dipastikan mengajarkan Sejarah Lokal di Indonesia, kemudian berubah menjadi Sejarah Lokal Sulawesi Selatan (sering disingkat Sul-Sel). Selanjutnya seiring terbentuknya provinsi Sulawesi Barat (disingkat juga dengan istilah Sul-Bar) yang terpisah dengan Sulawesi Selatan tahun 2004, mata kuliah Sejarah Lokal Sul-Sel, berubah menjadi Sejarah Lokal Sul-Selbar. Jika terjadi perubahan nama seiring perubahan administrasi, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah sejarah lokal Sul-Sel berbeda dengan sejarah lokal Sul-Bar. Apakah sejarah lokal Sul-Bar baru dimulai seiring terbentuknya provinsi Sul-Bar?

METODE

Tulisan ini yang difokuskan pada analisa terhadap istilah Sejarah Lokal, dibuat dengan lebih banyak memanfaatkan sumber sekunder selain dari sumber primer berupa data dari surat kabar yang merupakan koleksi pribadi penulis. Sumber sekunder yang dimaksudkan di sini, merupakan tulisan-tulisan yang sudah pernah dibuat oleh para sejarawan yang pernah membahas tentang sejarah lokal berupa laporan penelitian, buku, tesis, dan disertasi. Kajian para sejarawan ini lebih banyak digunakan yang pernah membahas mengenai Sulawesi Selatan dengan berbagai meminjam istilah Kuntowijoyo dinamika internal (Kuntowijoyo, 2003: 156) dan juga daerah lain di luar Sulawesi Selatan. Dengan data yang tersedia ini, dilakukan analisa mendalam untuk memikirkan kembali atau

mendiskusikan kembali bagaimana Sejarah Lokal dikaji. Meskipun fokus utama tulisan ini membicarakan tentang sejarah Lokal di Sulawesi Selatan, tetapi pembahasannya dikaitkan dengan wilayah lainnya untuk menemukan formulasi yang baru atau istilah yang digunakan dalam judul sebagai “perspektif baru” dalam kajian sejarah lokal.

SEJARAH LOKAL DAN SEJARAH NASIONAL

Dalam buku sejarah lokal di Indonesia, Taufik Abdullah (1985) panjang lebar menguraikan perbedaan mendasar antara sejarah lokal dan sejarah nasional. Menurutnya, jika sejarah nasional adalah sejarah dari wilayah yang disebut Republik Indonesia, maka sejarah lokal adalah sejarah dari daerah-daerah administratif yang disebut provinsi. Batasan geografisnya dapat suatu tempat tinggal suku bangsa, yang kini mungkin telah mencakup dua-tiga daerah administratif tingkat dua atau tingkat satu, dan juga dapat pula suatu kota, atau malahan suatu desa.

Sejarah lokal dapat dirumuskan sebagai kisah kelampauan dari kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada daerah geografis yang terbatas. Yang ditekankan di sini adalah ruang lingkup geografis, bukan problem teoritis-filosofis (Abdullah, 1985: 15). Sejarah lokal menekankan pentingnya “tempat” atau “ruang”. Dengan demikian sejarah lokal berarti sejarah suatu tempat “locality” yang batasannya ditentukan oleh “perjanjian” yang diajukan oleh penulis sejarah (Abdullah, 1985: 14-15).

Obyek dari sejarah lokal pada umumnya tidak identik dengan obyek sejarah nasional, baik mengenai aspek temporal maupun aspek spasialnya. Kedua unit sejarah tersebut adalah termasuk dua kategori yang berlainan (Kartodirdjo, 1982: 35). Keduanya menuntut perumusan permasalahan yang berbeda-beda dan skala pentingnya peristiwa yang berbeda pula (Abdullah, 1985: 16). Meskipun keduanya memiliki obyek dan aspek yang berbeda, bagi Sartono Kartodirdjo perspektif nasional merupakan aspek yang sentral untuk memahami sejarah lokal. Sejarah lokal mempunyai arti apabila dipandang sebagai bagian dari Sejarah Nasional, dengan perkataan lain, kejadian-kejadian diinterpretasikan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa dari Sejarah Nasional atau dikatakan lebih tegas, banyak peristiwa-peristiwa lokal tidak dapat diterangkan tanpa menunjukkan hubungannya dengan peristiwa-peristiwa dalam Sejarah Nasional (Kartodirdjo, 1982: 37-38).

Apakah kiranya yang memaksa kita untuk menggunakan perspektif nasional? Kita hidup dalam masa pertumbuhan negara nation, maka suatu pandangan nasional adalah kebutuhan real. Artinya banyak permasalahan sentral yang kita hadapi sekarang dan masa yang akan datang adalah masalah nasional. Gerakan regionalistis, seperti gerakan Permes-ta (Perjuangan Semesta Alam), RMS (Republik Maluku Selatan), merupakan masalah nasional yang memerlukan pengetahuan mendalam untuk mendapatkan pemecahannya.

Memahami sejarah Indonesia rasanya tidak cukup jika hanya dilihat dari konteks nasional saja, karena sejarah seperti ini hanya menampilkan peran elit nasional sebagai penentu jalannya sejarah. Sejarah juga mestinya dilihat dalam konteks lokal, agar peristiwa dalam lokalitas serta peran elit lokal mendapat proporsi dalam penulisan sejarah. Relevan dengan pendapat Bambang Purwanto bahwa sejarah Indonesia mestinya dibangun dari perspektif sejarah daerah atau lokal, karena penulisan sejarah model ini menempatkan kesadaran tentang keindonesiaan bukan hanya didasarkan pada konsep yang datang dari pusat atau oleh segelintir elit yang berlebel nasional (Purwanto, 2006: 183). Dengan demikian, kajian sejarah yang terfokus pada lokalitas menjadikan penulisan sejarah lebih adil, tidak sentralistik dan tidak elitis.

Kajian sejarah lokal sangat diperlukan guna menangkap dan mengungkap momen-momen penting yang terjadi dalam lokalitas, mungkin peristiwa tersebut ada keterkaitannya dengan peristiwa nasional atau malah sebaliknya peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang “terlepas” karena lahir dari “embrio” politik di tingkat lokal semata. Bagi Kuntowijoyo, kajian sejarah lokal akan lebih menarik manakala peristiwa nasional menjadi peristiwa lokal, atau dengan kata lain, peristiwa-peristiwa dalam konteks lokal dapat dilihat keterkaitannya dengan peristiwa nasional, bukan sebaliknya peristiwa lokal tetap lokal, akan tetapi lokal yang meningkat menjadi nasional, atau bahkan lebih luas lagi, meningkat menjadi bagian dari peristiwa internasional (Kuntowijoyo, 2003: 186).

Sejarah Lokal Sul-Sel: Sejarah Maritim atau Sejarah Agraris?

Anggapan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat bahari adalah salah satu anggapan utama yang terus menerus dihidupkan dan tidak hanya orang luar daerah ini saja, tetapi juga orang Sulawesi Selatan sendiri. Di berbagai kesempatan penelitian ilmu sosial dan humaniora dari Sulawesi Selatan, sering dianggap ahli dalam soal-soal yang menyangkut masalah kelautan, pelayaran atau setidaknya masalah pantai. Dan apabila penelitian yang menggunakan seluruh Indonesia sebagai fokus pengamatan, tidak jarang masyarakat Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu sample “masyarakat pesisir” (Abd. Latif, Bambang Sulistyono, Dias Pradadimara, dkk, 2001: 142). Anggapan tersebut tidak pernah diuji, tetapi terus-menerus dipertahankan, dan tentu saja memiliki banyak “bahaya”. Namun, “bahaya” yang terbesar dari anggapan ini adalah kenyataan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan terutama masyarakat petani, khususnya petani tanaman pangan. Pemahaman “keliru” tentang masyarakat Sulawesi Selatan merupakan bagian dari dinamika sejarah yang sarat dengan intervensi kekuasaan. Menjadi benar dalam konsep kontinuitas bahwa sejarah tidak terjadi secara alami dan begitu saja, suatu hal bisa kontinu dan lestari manakala ada kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat secara sengaja mendorong (atau menentang) bertahannya hal tersebut. Ia takkan dapat, dengan pada dirinya sendiri, bertahan dan lestari (Pradadimara dan Effendy, 2004: vii-xix).

Pendapat serupa juga telah dikemukakan oleh Cristian Pelras, baginya anggapan yang mengatakan bahwa orang Bugis sebagai masyarakat maritim, pengelana lautan yang kuat, yang dulu terlibat dalam perdagangan budak dan perampokan, penganut agama Islam yang taat, serta pedagang yang sukses, tidak tepat dan patut diuji kembali. Lebih lanjut, Pelras menguraikan bahwa jika menilik lebih jauh dalam sejarah mereka, ternyata hanya sedikit dari mereka yang terlibat dalam aktivitas maritim dan hampir tidak ada yang jadi perampok (Pelras, 2005: 37; 2005: 3-4).

Demikian pula halnya dengan predikat bajak laut yang diberikan kepadanya, sama sekali keliru dan tidak berdasar, karena aktivitas maritim mereka baru benar-benar berkembang pada abad ke-18 Masehi. Perahu Pinisi’ yang terkenal yang dianggap telah berusia ratusan tahun, bentuk dan modelnya sebenarnya baru ditemukan sekitar akhir abad ke-19 hingga dekade 1930-an. Sementara, yang menjadi jantung ekonomi mereka adalah perdagangan, produksi tanaman komoditas, dan pertanian padi (Pelras, 2005: 3-4).

Berbagai bukti sejarah telah menunjukkan bahwa sebagian besar kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan merupakan kerajaan yang bercorak agraris, tak terkecuali kerajaan Gowa. Menurut Edward L. Polinggomang hingga abad ke-15 kerajaan Gowa masih merupakan kerajaan agraris, hal tersebut dapat dibuktikan dari pusat kerajaannya yang jauh dari wilayah pantai. Perubahan baru terjadi ketika Raja Gowa ke-9 Karaeng Tumaparisi Kalonna (1510-1546) yang berinisiatif memindahkan pusat kerajaan dari Tamalate (pedalaman) ke Sombaopu (pantai) (Poelinggomang, 2002: 22-23). Pindahnya pusat kerajaan tersebut menurut Edward L. Poelinggomang menandakan perubahan orientasi kerajaan dari agraris ke maritim dan diperkuat lagi dengan jabatan syahbandar yang baru dikenal pada masa pemerintahan Tumaparisi Kalonna (Poelinggomang, 2002: 23).

Tetapi berbeda dengan pendapat tersebut di atas, Antony Reid meyakini bahwa jauh sebelum Tumaparisi Kalonna sebagai Raja Gowa, Kerajaan Gowa sudah merupakan kerajaan maritim bahkan mungkin pada awal-awal berdirinya. Argumen yang diajukan oleh Reid tersebut berpatokan pada ornamen-ornamen kerajaan Gowa seperti gaukang atau kalompoang yang menunjukkan sebagai sebuah kerajaan maritim. Gaukang atau Kalompoang dianggap sebagai benda yang berkuasa yang berada dalam pemeliharaan Aru atau Karaeng. Dengan mengutip pendapat P.J. Kooremen, Heddy Ahimsa Putra menjelaskan bahwa Gaukang adalah sebuah benda yang aneh, baik bentuk ataupun warnanya, dan ini bisa berupa sebuah batu, sepotong kayu, buah-buahan tertentu, sepotong kain, atau kadang-kadang senjata atau perisai dengan kekhususan tertentu. Pendeknya dia adalah benda aneh, yang diketemukan atau didapat dengan cara yang aneh, rahasia atau cara yang luar biasa (Ahimsa Putra, 1988: 119). Lebih lanjut Reid mengemukakan bahwa berdasarkan cerita kronik tentang kontrak yang disepakati oleh “sembilan pelayan” (kasuiang salapan-ga) kepada penguasa pertama Kerajaan Gowa yakni Karaeng Bajo berjanji tidak akan mengambil ayam, telur, buah, kelapa atau pinang kepada warganya. Menurut Reid dari

perjanjian tersebut sama sekali tidak menyebut beras, hal ini yang membedakan dengan kerajaan-kerajaan Bugis yang jauh di utara yang bercorak agraris (Reid, 2004: 135).

Mungkin Reid ada benarnya, karena sebagai kerajaan maritim Gowa kemudian mengalami kesulitan pangan setelah kalah perang melawan Arung Palakka pada abad ke-17. Akibat perang itu Kerajaan Gowa harus merelakan sebagian wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan Arung Palakka dan Kompeni, tak terkecuali daerah yang kaya beras seperti Polombangkeng dan Maros (Andaya, 2004: 332). Dalam laporan Spellman yang telah dikutip oleh Andaya menyebutkan bahwa Kompeni merupakan salah satu pemilik tanah terbesar di Sulawesi Selatan. Daerah-daerah tersebut, meliputi wilayah: Bantaeng, Biri, Polombangkeng, Galesong, Batu-Batu, Aeng, Barombong, Pa'nakukang, seluruh Makassar dan daerah Bulukumba serta pantai barat daerah Maros hingga Segeri (Andaya, 2004: 333).

Andaya mencatat di enam wilayah di pantai barat, setiap kali panen Kompeni menerima beras masing-masing: Maros 43.938 gantang, Barru 5.954 gantang, Siang 8.748 gantang, Bungoro 2.714 gantang, Labakkang 7.898 gantang dan Segeri 22.896 gantang. Jumlah beras yang terkumpul di enam daerah tersebut merupakan bagi hasil 1/10 dari seluruh produk beras dari kerajaan-kerajaan itu (Andaya, 2004: 332). Tidak heran jika kemudian VOC berperan penting dalam mengendalikan dan memonopoli perdagangan hasil-hasil bumi di Sulawesi Selatan terutama beras hingga peralihan kekuasaan ke Hindia-Belanda di penghujung abad ke-18 (Poelinggomang, 2002: 35-46).

Pertanian merupakan pekerjaan utama penduduk pribumi Sulawesi Selatan. Harvey mencatat pada tahun 1906 sekitar 69,8 persen orang dewasa di Sulawesi Selatan bekerja di sektor pertanian, dan kemudian terus meningkat hingga mencapai 71,38 persen pada tahun 1930 (Harvey, 1989: 59). Maka, tidak salah jika kemudian pemerintah Belanda memberi perhatian yang sangat besar untuk mengembangkan sektor ini.

Wujud dari perhatiannya tersebut pemerintah Belanda membangun irigasi pertama di Afdeeling Bone pada tahun 1912 yang dapat mengairi areal pertanian seluas 4.300 bahu (Nur, 2003: 75). Selanjutnya program pembangunan irigasi terus-menerus dilaksanakan di beberapa tempat, antara lain: Irigasi Bila, Bengo, Leworeng, Palakka, Tempe, Tallo, dan Jeneponto. Pembangunan irigasi tersebut dapat memperluas lahan persawahan yang menggunakan irigasi dari 20.500 hektar pada tahun 1920 menjadi 57.000 hektar pada tahun 1936. Namun demikian, luas lahan persawahan yang menggunakan irigasi masih relatif sempit jika dibandingkan dengan luas sawah di Sulawesi Selatan tahun 1936 yang diperkirakan 227.193 hektar (Asba, 2007: 60).

Meskipun pemerintah kolonial telah membangun berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sektor pertanian, tetapi anehnya Sulawesi Selatan senantiasa kekurangan beras (bandingkan Pradadimara, 2017: 64). Hal ini dapat diketahui dari studi Nahdia Nur yang menyebutkan pada tahun 1900 Sulawesi Selatan mengimpor beras dari Rangoon, Saingon dan Siam sebanyak 1.300 ton kemudian meningkat menjadi 8000 ton pada tahun 1902 (Nur, 2003: 126-128). Selanjutnya sepanjang tahun 1927-1939 Sulawesi Selatan mengimpor beras 4 hingga 11 ton, tetapi yang lebih aneh lagi pada tahun 1938, 1939 dan 1940 Sulawesi Selatan surplus beras 59,9 ton, 50,8 ton dan 39 ton (Nur, 2003: 123). Pertanyaan yang kemudian muncul dari keterangan tersebut adalah mengapa di saat Sulawesi Selatan surplus justru impor beras semakin ditingkatkan?

Satu petunjuk yang dapat menjawab "keanehan" tersebut di atas bahwa beras tidak hanya dikonsumsi oleh penduduk Sulawesi Selatan saja, akan tetapi beras sering diantarpulaukan untuk memenuhi kebutuhan beras di berbagai daerah di Indonesia Timur, misalnya Manado, Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara (Latif, Sulisty, Pradadimara, dkk, 2001: 154). Tercatat bahwa sejak tahun 1917 sampai tahun 1927 Sulawesi Selatan mengimpor beras dari luar negeri sebesar 5,8 ton, dan 410 ton dari Pulau Jawa. Tahun 1929 hingga tahun 1937 Sulawesi Selatan mengimpor beras dari luar negeri sebanyak 297 ton dan dari Pulau Jawa 404 ton (Latif, Sulisty, Pradadimara, 2001: 154). Fenomena ini terus berlanjut, tercatat pada bulan September 1955 Sulawesi Selatan mendatangkan beras dari pulau Jawa 14.000 ton untuk menutupi kebutuhan beras di beberapa tempat di Sulawesi dan Maluku (Pedoman Rakjat, 22 September 1955: 2).

Tentang konsep patron-klien

Sama halnya dengan konsep siri', konsep patron-klien adalah konsep yang kerap digunakan untuk menggambarkan masa lalu dan masa kini masyarakat Sulawesi Selatan. Kajian mutakhir yang dilakukan R. Ziti Sohra, dkk (2009) menunjukkan bahwa budaya politik patron-klien masih sangat kental di Sulawesi Selatan. Saat Pilkada dilakukan di 10 kabupaten di Sulawesi Selatan pada tahun 2005 menunjukkan praktik perilaku politik patron-klien. Ini terlihat, khususnya di daerah Soppeng, Barru, Pangkep dan Maros. Pasangan bupati dan wakil bupati di keempat daerah tersebut berasal dari bangsawan lokal yang bergelar Andi atau Bau. Hal ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh bangsawan di Sulawesi Selatan. Jumlah pendukung (klien) yang banyak menjadi faktor penentu kemenangan mereka dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung (Zuhra, dkk, 2009: 186-189).

Berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Michael Buehler tentang pilkada langsung tahun 2005 di Kabupaten Gowa, Pangkep dan Soppeng. Menurutnya hanya kandidat yang memiliki jaringan personal yang kuat di level-level bawah (seperti desa dan kecamatan) di kabupaten yang memiliki kesempatan yang besar untuk memenangkan Pilkada 2005 di Sulawesi Selatan. Kandidat yang tidak populer di kabupaten tidak bisa memenangkan pilkada, Syafruddin Nur sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Pangkep dan Andi Soetomo pemenang Pilkada Kabupaten Soppeng tahun 2005 (Buhler, 2009: 101-110). Pilkada Kabupaten Gowa menarik karena Ichsan Yasin Limpo yang memenangkan Pilkada berhasil mengalahkan rival-rivalnya yang lain, termasuk Andi Maddusila yang merupakan keturunan langsung raja Gowa yang terakhir Andi Idjo Karaeng Lalolang.

Telah banyak penelitian yang mengkaji peran aristokrat sebagai kelompok yang menempati posisi patron dengan hubungannya dengan klien mereka. Berbagai kajian yang membahas sistem patron-klien di Sulawesi Selatan dalam waktu yang berbeda, antara lain: Hasan Walinono, "Tanete: Suatu Studi Sosiologi Politik" (1979), Heddy Ahimsa Putra, Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan (1988), Christian Pelras, "Patron-client ties among the Bugis and Makassar of South Sulawesi" (2000). Dari kajian-kajian ini tampaknya hubungan patron-klien dalam masyarakat Bugis-Makassar telah menjadi pola yang sangat umum dan telah bertahan lama di bawah situasi politik dan historis yang berbeda-beda.

Namun indikasi akan adanya perubahan-perubahan pola hubungan patron-klien ini dapat dilihat pada periode 1950-an. Pada periode ini kelompok aristokrat tampaknya kurang memegang peran penting dalam dinamika politik lokal di Sulawesi Selatan. Setidaknya dari delapan kepala daerah swatantra yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara saat itu hanya satu orang saja yang berasal dari keluarga bangsawan yaitu Andi Pangerang Petta Rani sebagai Kepala Daerah Bone. Walikota Makassar adalah Ahmad Dara Sjahrudin, Kepala Daerah Kabupaten Makassar adalah H.M. Yunus Daeng Mile, Kepala Daerah Kabupaten Pare-Pare adalah Maladjong Daeng Liwang, Kepala Daerah Luwu adalah Abd. Madjid, Kepala Daerah Mandar adalah Sampara Daeng Lili, Kepala Daerah Sulawesi Tenggara adalah R.M. Pasunda dan Kepala Daerah Bone adalah Andi Pangerang Petta Rani.

Keluarga bangsawan saat itu hanya menempati posisi-posisi non-formal di bidang politik dan pemerintahan sebagai kepala di daerah-daerah swapraja, akan tetapi di saat yang sama masyarakat secara umum menuntut penghapusan daerah-daerah swapraja serta penghapusan dan pembagian tanah-tanah ornamen milik pemerintah swapraja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan dihapusnya pemerintahan swapraja dan pembagian tanah-tanah ornamen kerajaan, maka posisi politik dan ekonomi kelompok aristokrat semakin tidak menentu.

Merosotnya peran politik kaum aristokrat semakin jelas terlihat saat pemilu 1955. Patut untuk diuraikan di sini bahwa pada pemilu tersebut Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bone hanya memperoleh 31.066 suara atau 10,43 persen dari total pemilih di daerah ini. Perolehan suara NU jauh lebih tertinggal jika dibandingkan dengan Masyumi yang meraih 80.367 suara atau 27,00 persen dari total pemilih di kabupaten yang sama. Padahal salah satu calon anggota DPR NU adalah Andi Mappanyukki yang merupakan Raja Bone dan

juga tercatat sebagai tokoh yang cukup disegani di Sulawesi Selatan, khususnya di Bone pada saat itu. Meskipun demikian ternyata beliau tidak terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 1955 (Djunedding, 2010: 234-236).

Demikian pula halnya dengan Nahdlatul Ulama Kabupaten Luwu yang hanya mendapatkan suara 701 atau 0,36 persen suara NU untuk daerah pemilihan Kabupaten Luwu. Suara partai ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perolehan suara Parkindo di daerah ini yakni 90.339 atau 47,46 persen. Padahal salah satu calon DPR NU untuk Kabupaten Luwu adalah Andi Djemma saat itu masih tercatat sebagai Datu Luwu. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata ketokohan beliau tidak mampu mendongkrak suara NU di daerah pemilihan Kabupaten Luwu. Mengingat suara NU sangat kecil di Kabupaten Luwu maka Andi Djemma tidak terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 1955 (Djunedding, 2010: 235).

Hal serupa juga dapat kita saksikan dengan perolehan suara PKR Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) pada pemilu 1955 mendapatkan suara kurang dari dua persen dengan demikian PKR tidak mendapat kursi baik di DPR maupun di Konstituante. Padahal PKR adalah partai yang cukup lama memainkan peranan penting dalam dinamika politik lokal di Provinsi Sulawesi, dan partai ini juga cukup berpengaruh pada birokrasi lokal di Provinsi Sulawesi. Sejak 1953-1960-an kursi Gubernur Sulawesi senantiasa berasal dari partai ini, dan calon-calon legislatifnya merupakan tokoh-tokoh penting di Provinsi Sulawesi. PKR merupakan wadah kerjasama antara cendekiawan dari berbagai suku di Kota Makassar dan anggota-anggota progresif bangsawan Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Seorang anggota PKR suku Makassar, Lanto Daeng Pasewang menggantikan Sudiro sebagai gubernur Sulawesi pada tahun 1953, dan kemudian pada bulan Juli 1956 digantikan oleh seorang anggota PKR yang lain yaitu Andi Pangerang Patta Rani, putera tertua Andi Mapanyukki. Calon legislatif PKR pada pemilu 1955, antara lain: Lanto Daeng Pasewang (gubernur Sulawesi), Henk Rondonuwu, Saleh Lahade, A. Makkulau, Andi Pangerang Patta Rani (Bupati Bone), Andi Ahmad Andi Djemma (putera Datu Luwu), Andi Boerhanuddin (Residen Sulawesi), Andi Tandjong, H. Yunus Dg. Mile (Kepala Daerah Kab. Makassar), Andi Iskandar Datu Botto (Datu Soppeng), Andi Pasang, Andi Machmud, Andi Baso Karaeng Tumabitjara Butta dan lain-lain.

Sejarah Lokal Pasca Reformasi

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari "singgasana" kepresidenan pada bulan Mei 1998 mengantar Indonesia menuju era baru. Pada era ini dinamika politik sub-nasional atau apa yang disebut sebagai 'daerah' atau 'lokal' memasuki era baru. Aktor, institusi, dan budaya lokal bermunculan kembali dan mulai memainkan peran dalam politik lokal. Aspek yang paling mencolok terkait dengan hal ini adalah desentralisasi yang menyangkut pemekaran wilayah.

Masa Reformasi menimbulkan keinginan baru untuk memecah Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Barat dan Luwu Raya, bahkan ada keinginan membentuk Provinsi Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai). Aspirasi untuk membagi daerah menjadi provinsi baru sejak awal mempunyai alasan-alasan yang bermacam-macam tetapi yang utama tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun di balik itu juga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan politik, budaya dan sejarah. Di samping alasan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, masalah suku dan budaya memang banyak yang mendasari pembentukan provinsi baru di Indonesia dewasa ini. Banten merasa lain dengan Sunda, sehingga membentuk provinsi sendiri. Begitu pula dengan Provinsi Gorontalo yang lebih banyak Islam dibanding dengan Minahasa dan Manado yang mayoritas Kristen.

Walaupun Maluku Utara, Banten dan Gorontalo tidak ingin keluar dari Republik Indonesia, seperti Aceh dan Papua, tetapi pola persamaan budaya mendasari kehendak dari sebagian masyarakat membentuk provinsi sendiri. Dengan demikian pertanyaan kita adalah apakah konsep Sulawesi Barat dengan Budaya Mandar dan Luwu Raya dengan Budaya Luwu dan Toraja memberikan cukup alasan untuk membentuk suatu provinsi?

² Persatuan profesor dan pelajar yang meneliti mengenai konstitusi

Karena soal budaya tentu bisa diperdebatkan oleh para ahli. Namun kita mengetahui bahwa akar budaya Bugis, Makassar, Mandar dan Luwu adalah sama, walaupun bahasa sedikit berbeda (Kalla, Fajar, 27 April 2001: 1).

Perhatian yang besar terhadap daerah atau apa yang disebut sebagai regionalisme dan primordialisme pasca reformasi, menurut Taufik Abdullah seakan-akan membawa Indonesia kembali ke masa tahun 1950-an ketika tuntutan desentralisasi sedang menggebu-gebu. Maka tiba-tiba pula masyarakat bangsa disadarkan bahwa masalah desentralisasi dan otonomi bukanlah sekedar hubungan antara provinsi dengan kabupaten-kabupaten. Maka seperti dulu juga tuntutan pemekaran provinsi pun terjadi. Bahkan bukan pula sekedar itu, juga hubungan kabupaten dengan kecamatan, maka juga seperti dulu pemekaran kabupaten juga dituntut pula (Abdullah, 2011: 333).

Seakan-akan dengan tiba-tiba pula reformasi mengingatkan masyarakat bangsa akan kompleksitas dari sebuah negara bangsa yang bukan saja bersifat multi-etnis dengan segala embel-embelnya, tetapi juga terdiri atas wilayah-wilayah yang mempunyai sumber alam yang berbeda-beda. Regionalisme yang selama ini diperlakukan sebagai sesuatu yang "haram", kini dengan berbagai kedok politik dan argumen sosio-ekonomis, bahkan antropologis tampil ke permukaan (Abdullah, 2011: 333).

Selama tiga puluh dua tahun kekuasaannya, pemerintah Orde Baru menyingkirkan sejauh mungkin segala sesuatu yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Hal ini didahului oleh penolakan Soeharto terhadap semua sentimen kedaerahan yang dianggap sebagai bagian dari kesukuan. Meskipun terbukti bahwa pengertian tentang etnisitas dahulu dan sekarang sangat melekat di batin sebagian besar orang Indonesia. Tuntutan untuk memperoleh otonomi daerah yang lebih luas, demikian juga merebaknya konflik antar etnis sesudah 1998, menunjukkan bahwa identitas etnis masih sangat hidup sesudah ditindas lebih dari tiga dasawarsa. Karena setelah dikungkung sekian lama, topik mengenai kesukuan muncul lagi pada tahun-tahun belakangan.

Sepintas lalu dapat diasumsikan bahwa identitas kedaerahan pasti berakar dalam periode silam, pada zaman penjajahan atau bahkan masa sebelumnya. Memang solidaritas sesama suku sering ditampilkan sebagai wujud primordialisme, yaitu sentimen yang tidak pernah mengalami perubahan dan didasarkan pada budaya, ras, serta konstelasi komunitas yang dibentuk oleh sejarah. Pada kenyataannya, sementara negara bangsa Indonesia masih dalam proses pembentukan, sedemikian pula terjadi pada daerah-daerah dan identitas suku. Batasan daerah maupun identitas suku masih bersifat lunak, terbukti belum kokoh. Perlu diketahui bahwa perbedaan antar suku pada waktu itu tidak selalu setajam sebagaimana tampak dipermukaan, sehingga masih ada ruang untuk menegosiasikan batasannya. Tetapi hampir selalu pembentukan identitas beriringan dengan pembekuan kesadaran komunal dan berkolerasi dengan perkembangan historis tertentu.

Konsep tersebut juga diperkuat oleh Clifford Geertz, menurutnya hampir semua "negara baru" pascakolonialisme di Asia Tenggara dan Afrika menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan sentimen-sentimen primordial. Hanya saja wujudnya berbeda-beda. Indonesia sebagai negara baru menurut Geertz rentan dengan sentimen-sentimen primordial seperti regionalisme, agama dan adat-istiadat kemudian hal ini menjadi pemicu utama munculnya pertentangan-pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah pada periode tahun 1950-an (Geertz, 1992: 102).

Menguatnya identitas lokal pasca reformasi dapat dipahami sebagai wujud dari proses Indonesia yang sedang bertransformasi, munculnya gejala kedaerahan yang terjadi pada periode tahun 1950-an, berkembangnya tuntutan otonomi daerah yang luas dan adanya keinginan yang semakin luas beberapa daerah atau etnik untuk memisahkan diri dari Indonesia sampai simpang siurnya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, dapat dilihat sebagai indikasi dari ketidak berhasilan atau belum selesainya proses pembentukan identitas Indonesia. Sebaliknya kesadaran tentang identitas etnik di berbagai wilayah di Indonesia semakin menguat (Purwanto, 2006: 166).

Menguatnya kesadaran akan identitas etnis sangat sulit dipisahkan dari proses terbentuknya provinsi Sulawesi Barat sebagai hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Perasaan diperlakukan tidak adil dan perasaan berbeda dengan etnik-etnik lainnya di Sulawesi Selatan juga turut mewarnai terjadinya proses ini. Selama beberapa

dekade, orang-orang Mandar merasa terpinggirkan dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan yang rata-rata dikuasai oleh orang Bugis-Makassar. Bahkan representasi politik masyarakat Mandar di kancah politik nasional lebih banyak diperankan oleh orang-orang Bugis (Idham dan Saprillah, 2010: 122).

Pemekaran Sulawesi Barat terkait pula dengan upaya resolusi konflik yang potensial sewaktu-waktu meledak di akar rumput politik, sebagai akibat hilangnya kepercayaan sosial (social trust) serta terjadinya disorientasi sosial terkait dengan tidak ditemukannya pemimpin yang berkarakter untuk membantu masyarakat secara arif menyikapi perubahan yang terjadi tanpa mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa (Imawan, 2009: 144-151). Pemekaran ini juga telah menyisakan pengusiran dan kekerasan antar kelompok masyarakat karena perbedaan identitas etnik dan keagamaan untuk menentukan hak atas ruang (Purwanto, 2006: 169).

Menguatnya kesadaran akan identitas etnis sebagai cikal-bakal terbentuknya Sulawesi Barat juga terlihat dalam kajian Edward L. Poelinggomang, menurutnya bahwa ada kemungkinan gagasan untuk membentuk Provinsi Sulawesi Barat yang terpisah dengan Sulawesi Selatan muncul karena Provinsi Sulawesi Selatan hanya selalu diidentifikasi sebagai tempat orang Makassar dan orang Bugis. Walaupun kemudian pada tahun 1970-an, pihak pemerintah menyadari bahwa Sulawesi Selatan terdapat empat kelompok pengguna bahasa yang berbeda. Berdasarkan kriteria itu, maka dinyatakan bahwa di daerah itu terdapat empat etnis, yaitu Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja (Poelinggomang, 2012: 132).

Sejak itu, menurut Edward L. Poelinggomang mereka yang dari wilayah Mandar mulai mengidentifikasi diri sebagai orang Mandar, terlepas dari kelompok etnis lainnya, Makassar atau Bugis, ketika hanya dikenal hanya dua etnis. Sesungguhnya Makassar dan Bugis adalah konsep kelompok politik yang diciptakan oleh Speelman seusai Perang Makassar, namun kemudian istilah itu digunakan untuk menunjukkan kelompok etnis yaitu Makassar dan Bugis. Pemantapan identitas diri sebagai orang Mandar itu telah melapangkan para tokoh masyarakatnya bergiat mengorganisasikan diri, walaupun berada di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Keekerabatan yang dibangun itu menggugah mereka untuk kembali memikirkan pembentukan provinsi sendiri (Poelinggomang, 2012: 132).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed.). 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2011. "Regionalisme dan Sentralisme", dalam Sita van Bemmelen dan Remco Raben (peny.). *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV dan NIOD.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Makassar: Innawa.
- Asba, A. Rasyid. 2007. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Buehler, Michael. 2009. "The Rising Importance Of Personal Networks In Indonesia Local Politics: An Analysis of Distrik Government Head Election In South Sulawesi In 2005", dalam Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto (eds.). *Deeping Democracy In Indonesia? Direct Election For Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS.
- Djunedding, Burhaman. 2010. "Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan". Tesis Master yang tidak diterbitkan Universitas Gadjah Mada.
- Geertz, Clifford. 1992. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Idham dan Saprillah. 2010. *Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*. Solo: Zada Haniva Publishing.

- Imawan, Riswanda. 2009. "Urgensi Politik Pembentukan/Pemekaran Daerah Otonomi", dalam Andi Ramses M. (ed.). Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: MIPI.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Hstorigrafi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Gramedia.
- _____. 1993. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Latif, Abd, Bambang Sulisty, Dias Pradadimara, dkk. 2001. "Sebuah Perspektif Struktural dan Jangka Panjang Atas Konflik Komunal: Pengalaman Daerah Timur Indonesia". Makassar: Laporan Penelitian Jurusan Sejarah Unhas.
- Nur, Nahdia. 2003. "Produksi dan Pemasaran Beras di Sulawesi Selatan 1900-1943". Tesis tidak diterbitkan pada Program Pascasarjana Studi Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada.
- Pelras, Christian. 2000. "Patron-client ties among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi", dalam Roger Tol, Kees van Dijk and Greg Acciaioli (eds). *Authority And Enterprise Among The Peoples of South Sulawesi*. Leiden: KITLV Press.
- _____. 2005. "Budaya Bugis: Sebuah Tradisi Modernitas", dalam Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni (peny.). *Tapak-Tapak Waktu: Kebudayaan, Sejarah, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa.
- _____. 2005. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar, Forum Jakarta-Paris, EFEO.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- _____. 2012. *Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat*. Makassar: De La Macca.
- Pradadimara, Dias dan Muslimin A.R. Effendy. 2004. *Kontinuitas & Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Ombak.
- Pradadimara, Dias. 2017. "Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi Bagian Selatan di Abad ke-19". *Lensa Budaya*, Vol. XII, No. 2, Oktober.
- Purwanto, Bambang. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Reid, Antony. 2004. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Zuhra, R.Siti dkk. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.